



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MASLANI**
2. Jabatan : **SENIOR PROJECT MANAGER**
3. NHK : **55875**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.740.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 183 m2/220 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000.000
2. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 1092 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.200.000.000

1. LAINNYA, ---(SEPEDA) SEPEDA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. LAINNYA, SEPEDA OLAHRAGA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. MOTOR, HONDA ADV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
5. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
6. MOBIL, HYUNDAI SANTAFE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 678.000.000
7. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 485.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	375.597.782
F. HARTA LAINNYA	Rp.	919.593.390
Sub Total	Rp.	5.720.191.172
III. HUTANG	Rp.	1.113.574.735
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.606.616.437

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.